

## ☞ Kontekstualisasi Multikulturalisme dalam Moderasi Beragama untuk Mengonter Narasi Ekstremisme

Ahmad Khoiri

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ahmad.khoiri20@mhs.uinjkt.ac.id

Received:	2022-02-05	Accepted:	2022-09-13	Published:	2022-09-20
-----------	------------	-----------	------------	------------	------------

**Abstract:** *This paper discusses multiculturalism as a crucial concept to counter extremism. The perspective used is the Islamic perspective, with the thesis that diversity is a necessity of God, so that Islam, through the Qur'an, guides human beings regarding ways of living with multicultural principles. At the same time, while some circles want a monocultural order, which is manifested by the proliferation of extremism in the name of Islam, it is as if in the Qur'an there are two contradictory teachings about plurality and how to respond to it. Based on the studies that have been carried out, this paper finds that multiculturalism is a moral-ideal of the Qur'an, while extremism is an ideological doctrine based on the interpretation of the Qur'an itself. Thus, deep multiculturalism can become a counter-narrative of extremism.*

**Keywords:** *Extremism; Islam; Multiculturalism.*

**Abstrak:** *Makalah ini membahas tentang multikulturalisme sebagai konsep krusial untuk mengonter narasi ekstremisme. Perspektif yang digunakan ialah perspektif Islam, dengan tesis bahwa keberagaman merupakan keniscayaan Tuhan, sehingga Islam, melalui al-Qur'an, menuntun manusia ihwal tata cara hidup dengan prinsip multikultural. Pada saat yang sama, sementara kalangan menghendaki tatanan monokultural, yang mengejauwanti dengan maraknya ekstremisme yang mengatasnamakan Islam—seolah dalam Al-Qur'an terdapat dua ajaran kontradiktif tentang pluralitas dan bagaimana respons terhadapnya. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, makalah ini menemukan bahwa multikulturalisme merupakan ideal-moral Al-Qur'an, dan merupakan kontekstualisasi moderasi beragama. Sementara itu ekstremisme merupakan doktrin ideologis berdasarkan interpretasi atas al-Qur'an yang kontradiktif dengan prinsip moderasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa multikulturalisme merupakan wujud kontekstualisasi moderasi beragama untuk melakukan kontra-narasi ekstremisme.*

**Kata Kunci:** *Ekstremisme, Islam, Multikulturalisme.*

## Pendahuluan

Paling sedikitnya setengah dekade terakhir, Indonesia berada di fase krisis keberagamaan. Padahal, Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Menurut data statistik tahun 2020, pemeluk Islam di Indonesia mencapai 229 juta jiwa, atau 87,2% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 274.9 juta.<sup>1</sup> Jumlah tersebut sama dengan 13% dari populasi umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam di Indonesia sendiri terdiri dari 99% Sunni, 0,5% Syiah, dan 0,3% Ahmadiyah. Sementara agama yang legal di mata negara yakni Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebagai agama mayoritas, Islam di Indonesia senantiasa memegang kunci perdebatan. Sebagian besar umat Islam berusaha mengaitkan dengan erat antara agama dengan negara sehingga tercipta relasi yang harmonis, yang lainnya lagi berusaha membenturkannya—atau mendominasi agama, yakni Islam, di antara yang lain, sebagai konsekuensi superioritas Islam itu sendiri. Kalangan terakhir ini yang kemudian menjadi embrio kekerasan atas nama agama, politik identitas, polarisasi umat, dan yang paling ujung adalah terorisme. Terorisme, dengan demikian, merupakan buah dari eksklusivisme beragama yang berprinsip monokultur: Islam mesti jadi budaya tunggal untuk seluruh Indonesia.

Dalam prinsip monokultural, umat Islam diperlakukan memiliki satu budaya, disponsori oleh dogma Islam, dan hidup dalam konteks sosial yang menunjukkan beberapa bentuk karakteristik. Pelukan doktrin agama fundamental Islam memberikan umat Islam secara kolektif kekhasan tertentu, dan kecenderungan untuk memberikan kesan yang kuat pada keragaman budaya lokal atau daerah.<sup>2</sup> Al-Qur'an dan hadis, menariknya, menjadi legitimasi atas monokulturalisme ini. Berasal dari penafsiran monolitik atas teks, lahirlah prinsip-prinsip ideologis Islam yang tidak hanya *rigid*, tetapi juga bahkan mengafirmasi ekstremitas. Ekstremitas inilah yang setelah menjadi isme, ia membenarkan aksi-aksi teror. Dengan demikian maka bisa ditarik kesimpulan: monokulturalisme adalah cikal-bakal ekstremisme bahkan terorisme. Kultur Muslim jihadis,<sup>3</sup> umpamanya, memiliki prinsip kebenaran tunggal yang menghapus segala kebenaran selainnya. Kebalikan dari ini adalah prinsip tentang kebenaran majemuk yang menegasikan ekstremitas. Maka itu terurai kebenaran bahwa multikulturalisme, antonim monokulturalisme, merupakan senjata melawan ekstremitas itu sendiri. Yang menarik, ternyata ini ada di dalam Al-Qur'an.

Tulisan ini hendak mengkaji hal-ihwal multikulturalisme dalam Islam sebagai kontra narasi ekstremisme. Pertama-tama akan dikaji mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara keniscayaan keberagaman penciptaan. Bagaimana para mufasir mengomentari ayat tersebut, dan bagaimana Islam mengafirmasi multikulturalisme di dalamnya. Multikulturalisme, sebagai bagian dari penerimaan atas pluralitas, akan melahirkan moderasi dalam beragama. Artinya, *wasathiyah* Islam, yang hari ini tengah marak dinarasikan oleh *civil society* dan pemerintah, adalah pengejawantahan

proporsional dari multikulturalisme. Jika *wasathiyah* adalah lawan dari *tatharruf*, dan ekstremitas, maka multikulturalisme bisa menjadi kontra-narasi ekstremisme yang paling efektif. Bagaimanapun, seperti kata Husein Muhammad, pluralitas manusia di jagat semesta merupakan kenyataan yang tidak bisa dinegasikan oleh apa pun serta siapa pun. Pertanyaannya adalah apakah masing-masing orang, dengan segenap perbedaan alamiahnya: etnisitas, ras, agama, pemikiran, gender, politik dan budaya, mempunyai hak egaliter untuk dihargai dan dihormati?<sup>4</sup> Faktanya, penegakan atas keberagaman tersebut telah melahirkan ekstremisme dan terorisme yang mengerikan.

### **Multikulturalisme dan Pluralisme**

Sebelum membahas multikulturalisme dalam Islam, perlu diuraikan tentang definisi multikulturalisme itu sendiri. Istilah multikultural tidaknya hanya digunakan untuk menggambarkan individu, tapi juga untuk menggambarkan negara, lembaga, kebijakan, dan kelompok. Secara historis, konsep multikulturalisme berasal dari Kanada modern, ketika otoritas Inggris mengizinkan mereka sepenuhnya menggunakan bahasa dan sistem hukum sipil Katolik Roma. Menurut Veronica Benet, ideologi dan kebijakan multikultural menganjurkan masyarakat untuk menghargai kelompok budaya yang berbeda. Term tersebut juga diterapkan untuk mengakui keberadaan masyarakat adat di negara-negara terjajah. Salah satu asumsi ideologi multikultural adalah bahwa penerimaan dan pengakuan publik terhadap budaya seseorang dan peluang untuk interaksi multikultural sangat penting untuk kesejahteraan.<sup>5</sup> Terminologi multikultur secara genealogis beririsan dengan *bikultur*, *bilingual culture*, yang singkatnya bisa diartikan penerimaan atas banyak kebudayaan. Kebudayaan dimaksud cakupannya sangat luas. Segala yang berbeda dari ras, suku, dan agama, memiliki posisi dan berada dalam takaran yang setara dalam perspektif multikulturalisme.

Multikulturalisme, sebagaimana disinggung sebelumnya, memiliki makna yang sama dengan pluralisme.<sup>6</sup> Menurut Fathi Osman, pluralisme merupakan bentuk kelembagaan yang menerima keragaman, memproteksi dan mengafirmasi kesetaraan, serta melestarikan relasi persaudaraan sesama manusia dalam lingkup pribadi maupun kelompok. Minoritas, dalam prinsip pluralisme, dapat berperan penuh dan setara dengan kelompok mayoritas, sekaligus membiarkan apa adanya identitas serta perbedaan yang khas.<sup>7</sup> Pluralisme, meski demikian, tidak secara kognitif mendorong persamaan dan meletakkan keyakinan setiap orang beriman dalam bahaya. Justru, ia secara politis menegaskan bahwa kekuasaan dan kewenangan tidak seyogianya dimonopoli kelompok, tatanan, dan organisasi tertentu, melainkan saling bekerja sama. Pluralisme dalam beragama, sementara itu, ialah mengakui keragaman, hak-hak keimanan, ekspresi, serta komunitas yang beragam. Jika tidak

demikian, maka bencana dan pembersihan etnis tidak akan berkesudahan. Perilaku eksklusif, tertutup, diskriminatif, dan tidak adil lahir dari penentangan akan pluralitas dan prinsip pluralisme.<sup>8</sup> Sikap ekstrem dan intoleran merupakan hasil buruk penyangkalan atas kemajemukan. Pluralitas, bagi kalangan ini, berusaha disatukan pada konsensus ideologis yang sarat menguntungkan pihak mereka.

Dari pengertian tersebut dipahami, bahwa meskipun secara esensial sama-sama bermakna sikap inklusif, multikulturalisme memiliki cakupan yang lebih luas dari pluralisme. Ketika berbicara pluralisme, maka yang mengemuka adalah bagaimana sikap keberagaman dalam merespons keberagaman. Sementara itu, multikulturalisme mencakup seluruh aspek, tidak hanya agama melainkan juga suku, ras, dan golongan. Di Indonesia, multikulturalisme bukan sesuatu yang asing. Kendati secara teoretis belum familiar, namun dalam praktisnya boleh jadi lebih tua dari diskursus di Barat. *Bhinneka Tunggal Ika*, ungkapan yang dinisbahkan pada Mpu Tantular dalam *Sutasoma*, merupakan akar konsep multikulturalisme yang khas Nusantara. Ia mencerminkan makna mendalam ihwal pengakuan bahwa bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, meski berdiri di atas keragaman etnis, ras, budaya, bahasa, dan keyakinan, tetaplah satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia.<sup>9</sup> Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* kemudian menjadi satu dari empat pilar kebangsaan, bersama Pancasila, NKRI, dan UUD 1945.

Multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia, terlepas dari kesamaan esensialnya, berada dalam proses menjadi (*process of being*).<sup>10</sup> Masyarakat hidup dalam hubungan inter-etnis yang harmonis. Tidak ada dominasi dukungan budaya yang satu terhadap budaya lain. Ada akulturasi lintas budaya di situ. Namun sejak era kerajaan Nusantara, ke era kolonialisme, lalu masa kemerdekaan, masa pemerintahan Orde Baru, hingga Reformasi, terminologi tersebut tidak berjalan dengan mulus belaka. Primordialisme, sebagai antonim pluralisme, melahirkan monokulturalisme. Karenanya, menurut Wasino, multikulturalisme masih harus disebarkan ke masyarakat luas, baik melalui institusi pendidikan politik, media massa, keluarga, institusi keagamaan, maupun pariwisata. Sebab, perbedaan kerap kali masih menjadi masalah. Perusakan tempat ibadah masih terjadi di sebagian besar tempat. Demikian pula konflik antar etnis seperti di Sampit, Solo, Aceh, dan lain-lain menunjukkan masih minimnya pemahaman multikulturalisme di kalangan masyarakat.<sup>11</sup> Jadi meskipun sudah bukan perkara baru, pengejawantahannya ke realitas konkret masih terus menjadi tantangan.<sup>12</sup>

### **Multikulturalisme dalam Islam**

Membahas multikulturalisme dalam Islam tidak bisa lepas dari penguraian aspek kesejarahan sejak agama ini lahir. Islam tidak lahir dari ruang hampa. Jazirah Arab, tempat kelahiran Islam, seperti dilukiskan Aman Amin, tidak berkultur Arab

semata.<sup>13</sup> Kendati para peneliti meyakini bahwa nenek moyang mereka satu, Jazirah Arab bukan teretoris yang monolitik. Mereka bersuku-suku, dan setiap suku memiliki strata sosialnya sendiri. Ada Arab Qahthan, misalnya, dan Arab Adnan,<sup>14</sup> yang dinisbahkan ke leluhur mereka. Amin juga menyanggah anggapan yang selama ini disematkan kepada Arab sebagai daerah yang terisolasi secara sosial-budaya. Menurutnya, Arab tidak terisolasi. Ia ikut terlibat dalam perdagangan internasional, dekat dengan peradaban Persia dan Romawi, serta secara harmonis berdampingan dengan Yahudi dan Kristen.<sup>15</sup> Dengan fakta tersebut, maka Islam tidak bisa dianggap sebagai agama monokultur. Islam merupakan agama yang lahir di tengah kemajemukan, pluralitas, dan sekaligus bercita-cita memperbaiki kemajemukan itu sendiri. Tercatat dalam sejarah, Nabi Muhammad mendamaikan pertikaian suku Auz dan Khazraj, lalu mendirikan negara Madinah yang menganut multikulturalisme—di mana Islam, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan.

Secara historis, Islam dan multikulturalisme memiliki relasi yang cukup erat. Islam lahir untuk memperjuangkan multikulturalisme, sementara itu multikulturalismelah yang membuat Islam menguasai peradaban dunia selama lebih dari sepuluh abad. Masalahnya hanya terletak pada peristilahan semata. Resistansi sebagian kalangan terhadap multikulturalisme lahir dari kebencian terhadap Barat sebagai pelopor istilah itu di satu sisi, dan pengabaian terhadap kesejarahan Islam di sisi lainnya. Karenanya, penolakan tersebut sering kali dilandasi penafsiran yang keliru terhadap teks al-Qur'an. Para Muslim eksklusivis yang mewariskan monokulturalisme seolah-olah mendapat justifikasi dari nas, dan mendapat legitimasi untuk bertindak keras terhadap keberagaman yang ada. Dendam atas dominasi Barat mungkin menjadi musabab atas penyelewengan sejarah dan tafsir nas ini, sementara ekstremisme sebagai buah pahitnya. Padahal, Al-Qur'an melukiskan keniscayaan multikulturalitas penciptaan dalam sejumlah ayat. Di antaranya, Allah swt. berfirman,<sup>16</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”* (QS. al-Hujurat [49]: 13)

Dalam al-Qur'an, Allah swt. juga banyak menerangkan tentang kehendak menciptakan manusia secara multikultur. Bahasa al-Qur'an mengenai ini ialah satu

komunitas (*ummah wāḥidah*) yang bisa dijumpai dalam sejumlah ayat. Allah swt. berfirman dalam surah Al-Baqarah [2]: 213,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ <sup>ص</sup> وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ  
بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

“Manusia itu (*dahulunya*) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (*untuk*) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.”

Juga pada ayat berikut,<sup>17</sup>

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ  
فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ  
مُخْتَلِفُونَ <sup>ل</sup>

“Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (*saja*), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.” (QS. al-Mā'idah [5]: 48)

Allah swt. juga berfirman,

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْأَلُنَّ  
عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika Allah menghendaki niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (*saja*), tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. al-Nahl [16]: 93)

Pada tiga ayat terakhir ini, *ummah wāḥidah* yang dimaksud ialah umat di bawah satu panji, satu agama, dan satu peradaban, yang semuanya merupakan kemustahilan. Namun demikian, istilah *ummah wāḥidah* juga diafirmasi Allah swt. pada ayat yang lain, seperti pada surah Yūnus [10]: 19, al-Anbiyā' [21]: 92, dan al-Mu'minūn [23]: 52. Pada ketiga ayat ini, *ummah wāḥidah* ialah satu asal-usul, satu spesies sebagai keturunan Adam. Penggunaan term yang demikian sama sekali tidak

mengindikasikan kontradiksi. Kesimpulannya ialah bahwa manusia berasal dari asal yang satu, yaitu Adam, satu agama yaitu monoteis. Tetapi satu keturunan tersebut telah Allah swt. jadikan bersuku-suku, ras, golongan, dan kepercayaan. Adalah tidak mungkin menyatukan mereka semua, dan keberagaman merupakan ujian menuju jalan kebenaran (*ṣirat mustaqīm*). Menguraikan keniscayaan multikulturalitas, Allah swt. menegaskan manusia sebagai makhluk lemah (QS. al-Nisā' [4]: 28) yang memerlukan kerja sama dalam kebaikan dan takwa (QS. al-Mā'idah [5]: 2), dengan menjalin silaturahmi (QS. al-Nisā' [4]: 1) dan harmoni antar sesama (QS. Āli 'Imrān [3]: 112). Bersamaan, Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang sombong dan berbangga diri (QS. al-Nisā' [4]: 36). Di tengah kehidupan yang multikultural, manusia harus berlomba menuju kebaikan (QS. al-Baqarah [2]: 148).

Multikulturalisme dalam al-Qur'an, secara filosofis, bertolak dari anggapan mengenai kemuliaan serta derajat manusia (*human dignity*). Karena itu, menurut Rusli, ajaran al-Qur'an tentang multikulturalisme diperhatikan melalui dua prinsip. *Pertama*, al-Qur'an tidak sekadar berkhitab untuk umat Muslim melainkan kepada pelbagai umat semisal Yahudi, Kristen, kaum pagan Mekah, dan umat manusia secara umum. Dalam al-Qur'an juga mudah dijumpai ungkapan yang mengarah pada pelbagai komunitas yang distingtif, melalui frasa 'hai orang-orang beriman (*yā ayyuhā al-ladzīna āmanū*)', 'hai manusia (*yā ayyuhā al-nās*)', dan 'hai orang-orang kafir (*yā ayyuhā al-kāfirūn*)', yang menunjukkan bahwa al-Qur'an memang tidak sekadar berkhitab untuk satu komunitas, yakni umat Muslim, tetapi juga berbicara kepada beragam umat. *Kedua*, al-Qur'an berbicara hal ihwal yang bersifat multikulturalistis. Tidak sedikit ayat yang mengindikasikan hal ini.<sup>18</sup> Yang menarik untuk dicatat adalah, dari tujuan normatif dan filosofis al-Qur'an tentang multikulturalisme yang terlukiskan dalam banyak sekali ayat, masih ada kalangan yang bercita-cita ke arah monokulturalisme. Para monokulturalis ini juga mendasarkan argumennya pada al-Qur'an, bahkan mengaku lebih memersonifikasi cita-cita ideal-universal dari Kitab Suci itu sendiri.

Karena itu kemudian perlu digarisbawahi, sekali lagi, bahwa yang al-Qur'an ajarkan bukanlah monokulturalisme, melainkan multikulturalisme. Persoalan historisitas istilah tidak perlu diperdebatkan, sebab Islam sudah mengajarkan penerimaan atas multikulturalitas bahkan sejak sebelum istilah multikulturalisme itu ada. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengakomodasi perbedaan ini yang juga menjadi landasan epistemis moderasi Islam—Muslim sebagai umat moderat (*ummatan wasāṭan*). Definisi moderasi (*al-wāṣaṭīyah*), menurut Hanafi, ialah adil, baik, tengah, dan seimbang.<sup>19</sup> Kata tengah (*wasat*) menunjukkan makna positif sebagai perlawanan makna pinggir (*tharf*) yang berkonotasi negatif. Makna pertengahan (*tawassut*) sebagai lawan pinggir (*taṭarruf*) inilah yang dikehendaki oleh Islam melalui ajarannya dalam al-Qur'an. Pinggiran berkonotasi ke arah ekstrem, radikal, yakni beragama

secara berlebih-lebihan sebagaimana diperingatkan al-Qur'an dalam surah al-Mā'idah [5]: 77 dan surah Hud [11]: 112.<sup>20</sup> Pada dasarnya, mereka yang berpandangan radikal-ekstrem menuntut monokulturalisme, dengan menyebut selain mereka sebagai kafir yang harus dimusnahkan.

Sungguhpun demikian, jika al-Qur'an mengafirmasi multikulturalisme dan menentang monokulturalisme, mengapa ekstremisme yang terjadi selalu mengatasnamakan Islam? Maka di sini perlu dijelaskan duduk perkaranya. Ali Masykur menegaskan harus ada perbedaan antara Islam sebagai agama dan sebagai ideologi.<sup>21</sup> Sebagai agama, melalui al-Qur'an, Islam telah menuntun pemeluknya untuk memahami keberagaman sebagai keniscayaan Tuhan. Sedangkan sebagai ideologi, penafsiran atas al-Qur'an adalah titik tolaknya. Jadi bukan Islam (*al-din*) yang menghendaki monokulturalisme, melainkan penafsiran atas Islam (*al-fikr al-dini*). Kalangan intelektual berbeda dalam mengemukakan ini. Ketika Hirsi Ali mengatakan bahwa ekstremitas tidak berakar pada kondisi sosial, ekonomi atau politik, melainkan pada teks-teks dasar Islam yakni al-Qur'an,<sup>22</sup> maka yang ia maksud ialah penafsiran atas teks. Masalahnya, para ekstremis tidak mengatakan kekerasan mereka berdasarkan penafsiran, dan dengan yakin mengatakan bahwa yang mereka lakukan benar-benar ajaran Islam yang murni. Maka tidak heran jika Hirsi Ali secara langsung mengatakan, Islamlah sumbernya.

### Islam dan Moderasi Beragama

Setelah menemukan bahwa Islam, melalui al-Qur'an, meniscayakan multikulturalitas dan mengajarkan umat untuk memegang prinsip multikulturalisme di tengah pluralitas, penting juga untuk dikaji relasi Islam dengan moderasi beragama—dan dengan demikian multuralisme semakin menemukan argumentasinya. Menurut Huzaemah, moderasi atau *wasathiyah* merupakan titik tengah yang menciptakan keseimbangan (*al-tawazun*) terhadap dua jalan maupun arah yang berbanding secara ambivalen: antara spiritualitas (*rūḥiyah*) dengan material (*maddiyah*), individualitas (*fardiyah*) dengan kolektivitas (*jama'iyah*), kontekstual (*waqi'iyah*) dengan tekstual, konsisten (*thabit*) dengan perubahan (*taghayyur*). Dalam pandangan Huzaemah, keseimbangan adalah watak dari Islam sebagai risalah,<sup>23</sup> dan moderasi merupakan ajaran inheren dari Islam itu sendiri. Ia juga telah diatur dalam fatwa MUI.

Makna dan substansi moderasi beragama, selain dari al-Qur'an, juga bisa ditilik dari pengalaman historis dan kenyataan sosial. Pada kasus Indonesia, penting ditambahkan guna mengamati ekspresi dan realitas umat Islam dalam percaturan politik. Konsep moderasi beragama tersebut krusial untuk dikaji secara terbuka karena pluralitas kenyataan sosial-budaya. Dalam perspektif antropologis, manusia sejatinya terlahir juga tumbuh dalam wujud yang heterogen. Pada wujud yang plural tersebut terdapat keragaman bahasa, etnis, dan budaya yang merupakan kenyataan sejarah



yang mustahil diingkari dan hingga kini malah tambah berkembang.<sup>24</sup> Dalam implementasinya, moderasi terproyeksikan guna menjaga keseimbangan antara pengalaman agama sendiri dengan respek terhadap praktik beragama orang lain berlandaskan emosi dan pengetahuan yang terkendali dan kewaspadaan akan kebenaran. Tidak mudah menyalahkan, apalagi menjustifikasi kekerasan. Moderasi beragama adalah beragama dengan nir-kekerasan dan cinta damai antar-sesama.

Dengan demikian, Islam dan moderasi beragama tidak bisa dipisahkan. Islam adalah entitas risalah, sementara moderasi adalah cara dari beragama yang ideal. Lawan moderasi ialah ekstrem, yang merupakan cara beragama yang manipulatif—tak ideal. Ekstremisme lahir dari rahim kesalahan penafsiran, dan eksploitasi agama. Untuk menghasilkan pemahaman moderat, maka pemahaman al-Qur'an harus bertolak dari aspek *maqashid*-nya, yakni memahaminya secara holistik. Menurut Fikriyati, pemahaman holistik akan menghindarkan pemaknaan sepihak hingga melahirkan tafsir radikal. Artinya, *maqashid* al-Qur'an menjadi parameter. Jika sebuah penafsiran berpotensi untuk menghilangkan salah satu dari *maqashid* al-Qur'an tersebut, maka tafsirnya masih harus dipertanyakan.<sup>25</sup> Oleh karena Islam yang ideal adalah Islam moderat, dan multikulturalisme juga diajarkan oleh Islam, maka moderasi beragama bisa menjadi upaya untuk mengonter narasi ekstremisme—bahwa Islam tidak mengajarkan ekstremitas.

Dalam konsepnya, moderasi sama dengan bergerak dari pinggir menuju pusat atau poros utama, sementara ekstremisme sama dengan bergerak menjauh dari poros utama menuju sisi terpinggir. Dalam konteks agama, sikap moderat dengan demikian merupakan pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah pilihan-pilihan ekstrem yang ada, sementara ekstremisme agama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku di luar batas moderasi. Karenanya moderasi beragama bisa dimaknai sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi sentral, selalu berbuat cukup, dan tidak ekstrem dalam menjalankan agama.<sup>26</sup> Moderasi beragama mesti dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara menjalankan agamanya sendiri dengan menghormati praktik keagamaan orang lain. Keseimbangan tersebut jelas akan mencegah terjadinya ekstremitas maupun fanatisme keberagamaan. Ia menjadi solusi dua kutub ekstrem dalam beragama, terutama Islam, yakni kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi dan kutub liberal atau ekstrem kiri di sisi lainnya.<sup>27</sup>

Namun demikian, tulisan tentang moderasi keagamaan tidak jarang sekadar memfokuskan gerakan moderasi sebagai solusi mengatasi masalah konservatisme agama atau yang sering dikenal sebagai ekstremisme kanan. Hal tersebut menggambarkan pemahaman yang kurang holistik tentang moderasi beragama, karena sebenarnya ia tidak hanya berfungsi menengahi mereka yang cenderung memiliki pemahaman keagamaan yang ultra-konservatif, tetapi juga kelompok yang memiliki

cara pandang dan perilaku liberal, atau yang sering disebut sebagai ekstremisme kiri. Baik ekstremisme kiri maupun ekstremisme kanan seperti gerakan sentrifugal. Mereka yang berhenti pada cara pandang, sikap, dan perilaku liberal akan cenderung terjerembap pemikiran ekstrem dalam memaknai ajaran agama. Mereka kehilangan teks-teks agama. Pada saat yang sama, mereka yang berhenti di sisi yang berlawanan akan *over*-memahami teks-teks agama tanpa mempertimbangkan konteksnya. Moderasi bertujuan memediasi dua kutub ekstrem tersebut, menekankan pentingnya internalisasi substantif ajaran agama di satu sisi dan kontekstualisasi teks-teks agama di sisi lainnya.

Ekstremisme jelas bukan bagian dari esensi ajaran agama manapun, terutama Islam. Itulah sebabnya logika ideologis yang ekstrem tidak akan pernah mampu memengaruhi umat beragama dalam jumlah besar, karena hakikat agama yang benar adalah menjaga harkat dan martabat kemanusiaan yang nilai-nilainya tentu diterima oleh masyarakat. Pihak-pihak yang mengampanyekan pandangan dan ideologi keagamaan ekstrem sering kali merupakan kelompok-kelompok kecil yang menghindari perdebatan atau diskusi akademis dan lebih cenderung memilih gerakan dan tindakan radikal-teror. Faktanya, yang membuat para ekstremis terlihat lebih besar dari yang sesungguhnya ialah karena suara dan pandangan berisiknya di ruang publik. Mereka sering mencari perhatian dengan melakukan tindakan di luar kebiasaan, yang tujuannya juga untuk mendapatkan simpati. Dengan strategi tersebut, kelompok pengusung ekstremisme berhasil membuat orang takut dan gelisah, tetapi meski begitu tidak akan berhasil secara signifikan. Pada akhirnya, Islam dan moderasi beragama tetap akan menang, sementara ekstremisme akan teratasi melalui *ethos* masyarakat, terutama Islam, yang progresif dan menjunjung tinggi konsep-konsep moderat.

### **Kontra-Ekstremisme**

Sebagian kalangan berpendapat, ekstremisme dilatari oleh keputusan terhadap hegemoni Barat. Namun perlu ditanyakan, apa alasan perlawanan besar umat Islam terhadap hegemoni tersebut. Menurut Mazrui, ada sejumlah faktor yang berkontribusi pada kesiapan Muslim untuk menghadapi Barat, di antaranya apartheid global. Korban militer terbesar adalah Muslim di seluruh dunia, karena perlawanan mereka terhadap ketidakadilan memprovokasi kekuatan api yang superior terhadap mereka. Pemerintahan George W. Bush telah mengebom dan menduduki sebagian dua negara Muslim; Afghanistan dan Iran.<sup>28</sup> Artinya ekstremisme yang termanifestasikan sebagai jihad mempunyai struktural yang kompleks dalam panggung sejarah. Tetapi bagaimanapun ia tidak dibenarkan sebagai paham tentang kekerasan dalam beragama. Maka antara anti-hegemoni Barat dengan bersikap ekstrem tidak selalu seiris, karena yang pertama tidak selalu membuang objektivitas kebenaran. Berbeda

halnya dengan ekstremisme sebagai ideologi yang disandarkan kepada Islam. Dengan demikian, kontra-ekstremisme adalah usaha melawan patologi keagamaan, terutama Islam, yang dicipta oleh sejarah itu sendiri.

Sebagai sebuah agama, Islam memiliki kecenderungan universal dan meskipun keras ekumenis, ia telah menunjukkan toleransi yang cukup besar terhadap agama-agama lain bahkan ketika dipraktikkan oleh minoritas yang tinggal di negara-negara Muslim. Secara historis, Islam menempatkan dunia di mana agama Muslim dan negara Islam diciptakan bersama dan tidak dapat dipisahkan, dan beberapa pengamat berpendapat bahwa itu memiliki lebih sedikit ruang untuk sekularisme daripada agama besar dunia lainnya. Jadi, meskipun ada kecenderungan fundamentalis di setiap agama, dalam Islam, kecenderungan seperti itu telah memainkan peran politik utama sejak abad kedelapan belas. Ini telah menciptakan masalah khusus bagi demokrasi dan hak asasi manusia di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia.<sup>29</sup> Terlebih lagi, di negara-negara seperti itu, perjuangan jihad lebih dari sekadar metafora kesukuan atau anti-modernisme. Ini telah menjadi perang literal terhadap nilai-nilai, budaya, dan institusi yang membentuk masyarakat liberal.

Jihad telah menjadi metafora untuk perjuangan ekstremisme, itu garis pentingnya. Sebuah survei empiris terhadap pemerintahan yang ada di negara-negara Islam menegaskan kurangnya kedekatan antara Islam dan demokrasi. Di hampir semua negara Muslim, demokrasi tidak pernah dicoba atau dikesampingkan setelah eksperimen yang gagal. Di Aljazair, seperti diuraikan Barber, setelah pemilihan yang karena kalangan ekstremis menang, dibatalkan, itu dalam bahaya besar. Di Mesir, di mana demokrasi belum benar-benar dicoba, kebebasan minimal sedang dikikis oleh pemerintah yang takut mencoba melacak musuh ekstremis. Di Kuwait, bahkan setelah perang untuk membebaskannya dari para penindas ekstrem Irak, demokrasi tidak terlihat. Negara-negara seperti Pakistan, Afghanistan, dan Sudan telah menjadi lebih tidak demokratis daripada ketika kaum ekstremis Islam lebih kuat, sementara sekutu Amerika seperti Arab Saudi, Yordania, dan UEA didesak untuk tetap berpura-pura demokratis saat mereka mengejar perjuangan anti-ekstremisme.<sup>30</sup> Multikulturalisme tetap tidak benar-benar terimplementasikan sebagaimana seharusnya.

Sebagaimana konsep multikulturalisme yang al-Qur'an bawa sebagai ajaran Islam, ekstremisme juga setua Islam itu sendiri. Sementara intelektual bahkan menegaskan bahwa kekerasan telah menjadi tabiat manusia, dalam arti lebih tua dari agama, sehingga malaikat protes kepada Allah swt. ketika Dia hendak menjadikan Adam sebagai pemimpin di bumi (QS. al-Baqarah [2]: 30). Namun, historisitas kekerasan selalu berkenaan dengan tabiat buruk manusia, dan kitab suci datang untuk menuntun mereka agar tidak mengikuti tabiat tersebut. Bahkan, menurut Fikriyati, kata *al-'unf*, bahasa Arab denotasi kata 'kekerasan' tidak ditemukan dalam Al-

Qur'an. Yang terlacak hanyalah kata yang secara konotatif bermakna kekerasan seperti kata *al-qatl*, *al-jihad*, *al-harb*, *al-qishash*, *al-dharb*, *al-'iqab*, dan *al-zhulm*.<sup>31</sup>

Karena itu, upaya kontra-ekstremisme yang dimaksud di sini tidak berarti mempertentangkan ajaran teks dengan teks, melainkan membenahi salah tafsir atas teks dengan kembali pada ideal-moral teks itu sendiri. Untuk tujuan itu, multikulturalisme dalam Islam, yang dijumpai melalui al-Qur'an, harus diejawantahkan menjadi konsep-konsep yang dapat mengonter narasi ekstremisme. Di Indonesia sendiri, ekstremisme mewujud sebagai aksi teror, persekusi, politik identitas dan populisme Islam. Maka untuk melakukan kontranarasi, multikulturalisme yang diajarkan Islam dapat dilakukan dengan menelaah ayat-ayat inklusivisme, toleransi, keadilan dan demokrasi.

### 1. Inklusivisme; *Khayr* dan *Ihsan*

Sementara kalangan cenderung menolak segala yang berbau 'isme' karena dianggap berasal dari Barat yang anti-Islam. Namun istilah inklusivisme di sini tidak akan diurut pada makna historisnya, melainkan makna filosofisnya sehingga dapat ditemukan padanannya dalam al-Qur'an. Allah swt. berfirman,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.” (QS. Āli ‘Imrān [3]: 64)

Berdasarkan ayat di atas, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak bersikap inklusif. Kebaikan (*al-khayr* dan *al-ihsan*) dipandang bukan sekadar jika berasal dari Islam, dan justru inklusif sebagai afirmasi atas *kalimah sawa'* antar agama.<sup>32</sup> Ini untuk menangkal klaim kalangan ekstremis bahwa yang baik dan benar hanya golongan mereka, dan yang lain adalah bid'ah, sesat dan kafir.

Islam menekankan perbuatan baik (*al-khayr*), tidak pada kekuatan maupun paksaan (*al-quwwah*).<sup>33</sup> Sementara itu, para aktor ekstremisme mengedepankan kekuatan konfrontatif untuk memaksa seluruh manusia berada dalam satu komando tunggal, yakni satu kekhalifahan. Para ekstremis memakai surah Al-Anfal [8]: 60 sebagai argumentasi, yakni firman Allah,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ  
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).”

Sayyid Quthb, yang menjadi ideologi ekstremisme, menafsirkan ayat di atas bahwa *isti'dad*, persiapan perang, hukumnya wajib sebagaimana wajibnya jihad untuk memerdekakan manusia. Quthb juga menyinyalir ayat tersebut sebagai perintah ketegasan menegakkan syariat ketuhanan, yakni *hakimiyyah*, sebagai kedaulatan tunggal. Umat Islam, kata Quthb, harus berpegang padanya.<sup>34</sup>

Sementara ekstremisme bertolak dari sikap eksklusif dalam beragama, Islam justru memerintahkan sikap inklusif sebagai ruang penerimaan atas multikulturalisme. Al-Qur'an, bahkan, menurut Abu-Nimer, mengedepankan inklusivitas di atas eksklusivitas untuk mengupayakan keadilan.<sup>35</sup> Melalui inklusivisme, yakni sikap keberagaman yang tidak mendukung eksploitasi kebenaran tunggal, maka ekstremisme akan teratasi. Inklusivitas, dengan kata lain, menjadi sarana bina damai (*peace building*) yang sangat efektif. Kebajikan (*al-khayr*) dan berbuat baik (*al-ihsan*) merupakan keniscayaan perilaku. Al-Qur'an mengajarkan kebaikan dan kelembutan, dan melarang kekerasan.

## 2. Toleransi dalam Pluralitas

Ekstremisme sama sekali menolak toleran terhadap segala yang berbeda. Bagi kalangan ekstremis, apalagi jelas-jelas non-Muslim atau kafir, sesama Muslim pun jika dianggap menyalahi Islam, dalam doktrin ideologi mereka, maka harus dipersekusi, dibenci, bahkan ditoror. Bagi para ekstremis, *right practice* dan *right belief* tidak bisa ditawar.<sup>36</sup> Islam, sebagai agama, harus tegak. Amaliah, sebagai perilaku agama, harus benar. Tidak ada toleransi bagi segala yang dianggap melenceng, tidak ada alasan pluralitas untuk membiarkan kebatilan. Bagi ekstremis, intoleransi adalah komitmen keberagaman.

Toleransi merupakan salah satu implementasi multikulturalisme, yang dapat mengonter narasi kalangan ekstremis yang intoleran. Meskipun kata *tasamuh*, *samahah* dan derivasinya tidak dijumpai dalam al-Qur'an, sejumlah ayat mengajarkan

toleransi dengan kata yang lain, semisal *al-'afw*, *al-rahmah*, dan *al-shafhu*.<sup>37</sup> Surah al-Kāfirūn [109]: 1-6 sering kali dijadikan dalil toleransi yang diafirmasi al-Qur'an.<sup>38</sup> Namun, ajaran toleransi juga dapat dijumpai dalam ayat lain. Allah swt. berfirman,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2]: 256)

Atau dalam ayat lain,

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ

“Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya (Al-Qur'an), dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Yunus [10]: 40)

Juga dalam surah al-Kahf [18]: 21,

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ قَدْ جَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا  
أَحَاطَ بِهَا سُرَادِقُهَا

“Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejalaknya mengepung mereka...”

Landasan filosofis toleransi di tengah pluralitas ialah bahwa tidak ada masalah yang bisa diselesaikan menggunakan kekerasan. Apalagi masalah tersebut memang didesain Tuhan, seperti keragaman penciptaan. Dalam toleransi, menurut Fathi Osman, umat Islam mesti menjalin relasi damai dan kerja sama konstruktif dengan pihak lain, melampaui sekat perbedaan di antara mereka. Perbedaan suku bukan untuk memantik intoleransi, tetapi untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan penghasilan secara kualitas dan kuantitas. Kekerasan, ekstremisme, hanya diizinkan untuk menghadapi serangan dan kejahatan, bukan untuk menyerang dan merusak kuil-kuil, gereja, sinagoge, masjid, dan tempat ibadah lainnya.<sup>39</sup> Pluralitas mesti menjadi peluang keramahan, bukan kemarahan.

Intoleransi sebagai buah ekstremisme, dengan demikian, bertentangan dengan ajaran Islam.

### 3. Demokrasi dan Keadilan Sosial

Syamsul Arifin, guru besar sosiologi agama UMM, Malang, punya tesis menarik bahwa populisme Islam—politik identitas yang lagi tren dipertontonkan sementara kalangan seperti FPI—bisa diproyeksikan sebagai kekuatan untuk merevitalisasi demokrasi hingga ke tataran ideal.<sup>40</sup> Demokrasi sendiri, menurutnya, lebih dekat dengan cita-cita politik yang dituntut al-Qur'an<sup>41</sup> untuk menciptakan tatanan sosial yang adil. Namun, Syamsul tidak menjelaskan aspek lain, bahwa populisme memiliki sisi lain yang mendekati ekstremisme. Artinya bahwa politik identitas justru mencederai demokrasi. Alih-alih menciptakan keadilan sosial, justru yang terjadi adalah ujaran kebencian yang pasti berujung aksi-aksi ekstrem. Sementara itu, Islam cukup lengkap mengajarkan keadilan sosial dan pemberdayaan sosial.<sup>42</sup> Ada beberapa prinsip Islam, menurut Abu-Nimer, yang relevan dengan aspek demokratis dan inklusivitas, sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Islam adalah untuk kemaslahatan umat, sehingga konsensus keumatan (demokratis) adalah yang esensial daripada pemimpin (monarki)
- b. Masyarakat secara keseluruhan wajib menjalankan tuntutan agama, merealisasikan kehidupan yang mapan, dan memerhatikan segala yang krusial untuk publik
- c. Kebebasan merupakan hak semua orang, dan menentanginya adalah sama halnya meninggalkan prinsip *syura* yang diajarkan al-Qur'an
- d. Semua orang setara dari asalnya
- e. Non-Muslim ikut ambil bagian atas *legacy* bersama, memiliki kehormatan yang sama, juga legitimasi sosial yang setara
- f. Penindasan dilarang dan wajib dilawan, dan
- g. Hukum berada di kedudukan tertinggi untuk menghindari tirani.<sup>43</sup>

Prinsip-prinsip demokratis tersebut, yang muaranya adalah tercapainya keadilan sosial, dan sebagai elemen multikulturalisme, jelas meruntuhkan prinsip-prinsip kalangan ekstremis<sup>44</sup> yang menghendaki berdirinya pemerintahan teokratis, yang selain tidak lagi relevan juga cenderung eksploitatif. Allah swt. berfirman,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara

*mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”* (QS. Al-Syura [42]: 38)

Al-Qur'an mengajarkan *syura*, disebutkan surah al-Shūra [42]: 38 di atas, jelas bukan seremonial musyawarah belaka, tetapi peran serta serius dalam mengambil keputusan. Menurut Fathi Osman, demokrasilah yang dapat memberikan cara-cara praktis bagi perwujudan *syura* tersebut, sebab di dalamnya terjamin martabat segenap manusia: kehidupannya, keluarga dan anak-anaknya, pikiran-pikirannya, kebebasan beragama, dan kepemilikan pribadi maupun umum mereka.<sup>45</sup> Pada saat yang sama, teokrasi dan monarki justru sering kali mewariskan ketegangan ekstrem yang mencederai Islam.

Tiga prinsip Qur'ani di atas, yakni inklusivitas, toleransi, dan iklim demokratis merupakan pengejawantahan spesifik konsep multikulturalisme yang diajarkan Islam. Kontra-ekstremisme bisa dilakukan dengan menawarkan argumentasi Qur'ani tersebut, sehingga klaim-klaim ekstremitas gugur dengan sendirinya. Di Indonesia, ekstremisme tidak monolitik. Aktornya banyak, lintas organisasi dan lintas ideologi. Hizbut Tahrir Indonesia, yang telah pemerintah bubarkan empat tahun lalu, misalnya, menginginkan pemerintahan monarki yang mereka klaim sebagai khilafah '*ala minhaj al-nubuwwah*'.<sup>46</sup> Front Pembela Islam, yang terlarang sejak penghujung tahun lalu, sebagai contoh lain, hobi melakukan kekerasan dan ekstremitas yang mereka klaim sebagai penegakan nahi mungkar.<sup>47</sup> Yang absen dari mereka adalah jiwa-jiwa inklusif, toleran, dan demokratis. Daripada multikulturalisme, mereka menuntut monokulturalisme.

Namun demikian, ekstremisme memiliki faktor yang kompleks. Multikulturalisme dapat mengonter narasi-ekstremisme apabila faktornya adalah keagamaan yang berlebihan (*ghuluww*) dan melampaui batas (*tatharruf*). Sementara bila faktornya berbeda, seperti ketimpangan sosial-ekonomi, maka kontra-narasinya juga berbeda—tidak bisa menggunakan argumentasi-argumentasi religius yang *nas-oriented*. Ekstremisme di Papua, umpamanya, yakni teror oleh KKB, masuk ke jenis terakhir ini. Separatisme di sana bergejolak karena ketimpangan sosial-ekonomi. Sementara multikulturalisme merupakan pendekatan persuasif menghadapi ekstremisme, ekstremisme KKB tidak bisa diatasi dengan persuasi melainkan pendekatan militeristik.

## Kesimpulan

Islam merupakan agama risalah Rasulullah saw., sebagai *rahmah li al-'alamin*. Konsekuensi dari hal itu ialah ketidakmungkinan terkandungnya ajaran-ajaran kekerasan dan ekstremitas, di dalamnya. Namun demikian, ekstremisme yang terjadi dengan mengatasnamakan agama terlalu simplistik jika disanggah sebagai 'tidak ada kaitannya dengan agama'. Ekstremisme merupakan ideologi yang lahir sebab



kesalahan penafsiran atas agama itu sendiri. Sementara Islam memuat ideal-moral tentang keniscayaan multikulturalitas, tafsir kalangan ekstremis justru menghendaki monokulturalitas dengan mengeksploitasi kebenaran tunggal; kebenaran mereka sendiri, dan menganggap selainnya sebagai kesalahan fatal, kesesatan, kekafiran, yang harus dibasmi. Dari situlah kekerasan terjadi, dan ekstremisme seolah mempunyai landasan teologis sebagai bagian inheren dari Islam. Apa yang telah dipaparkan di depan tentang multikulturalisme, meliputi inklusivitas, toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial yang memiliki dasar nas Al-Qur'an untuk membantah kalangan ekstremis dan mengonter narasi ekstremisme. Pada intinya, kekerasan tidak pernah ada legitimasinya dalam Islam. Bahkan, Islam menentanginya dengan mengajarkan prinsip multikulturalisme.

## Catatan Kaki

1. Data Reportal, "Digital 2021: Indonesia," <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia> (Diakses 19 Agustus 2022).
2. Erich Kolig, *Conservative Islam: A Cultural Anthropology*, (Maryland: Lexington Books, 2012), 19.
3. Di sini perlu dicatat istilah kunci, yaitu monokulturalisme, multikulturalisme, dan kultur jihadis (*jihadi culture*). Kultur jihadis ialah gagasan, kebiasaan, perilaku sosial, produk, atau cara hidup para jihadis sebagai produk dan praktik yang melakukan sesuatu selain memenuhi kebutuhan dasar militer. Kultur jihadis bersifat monolitik yang tidak hanya mengabsolutisasi kebenaran, melainkan juga memiliki distingsi dengan persepsi luar terhadap mereka. Lihat, Thomas Hegghammer, *Jihadi Culture: The Art and Social Practices of Militant Islamists*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2017), 5.
4. Husein Muhammad, *Menimbang Pluralisme: Belajar dari Filsuf dan Kaum Sufi*, (Bandung: PT Mizan dan Nuralwala, 2021), 4.
5. Veronica Benet, "Multiculturalism: Cultural, Social, and Personality Processes," *The Oxford Handbook of Personality and Social Psychology*, 2012, 4.
6. Di dunia akademik, dua terminologi tersebut digunakan secara bergantian. Meskipun ada yang mengatakan bahwa multikulturalisme dan pluralisme tidak sama, secara esensial keduanya sama. Lihat, Syafiq Hasyim, *Islam Nusantara dalam Konteks: Dari Multikulturalisme Hingga Radikalisme*, (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2018), 19. Konsep multikultur adalah respons atas pluralitas, dan pluralisme lahir karena keniscayaan dunia yang multikultur.
7. Mohamed Fathi Osman, *Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan: Pandangan Al-Qur'an, Kemanusiaan, Sejarah, dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2006), 2-3.
8. Osman, *Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan...*, 9-11.
9. Hasyim, *Islam Nusantara dalam Konteks...*, 20-21.
10. Multikulturalisme di Indonesia menjadi aspek fundamental-ideologis yang dinamis. Proses menjadi yang dimaksud di sini ialah bahwa tidak ada jaminan di masa depan bangsa ini akan menjadi multikultural, karena Indonesia adalah kontestasi dan konsensus. Ini penting untuk dipahami bersama, bahwa jika dinamika multikulturalisme menuju arah negatif, seperti dengan kemunculan politik identitas dan eksklusivisme Islam transnasional, maka Indonesia akan menjadi bangsa monokultural yang penuh *chaos*. Lihat, Hasyim, *Islam Nusantara dalam Konteks...*, h. 22. Karena itu, identitas sebagai negara multikultural mesti berjalan searah dengan kesadaran masyarakat Indonesia akan keniscayaan multikulturalisme. Ini urgen untuk disadari seluruh masyarakat.
11. Wasino, "Indonesia: From Pluralism to Multiculturalism," *Paramita*, Vo. 23, No. 2, 2013, 153.
12. Hasyim, *Islam Nusantara dalam Konteks...*, 21.
13. Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, cet. ke-10, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1969), 1.
14. Amin, *Fajr al-Islam...*, 5.
15. Amin, *Fajr al-Islam...*, 12.
16. Kata *li ta'arafu*, sebagai hikmah multikulturalitas, menurut Al-Zamakhsyari menandakan ketidakbolehan dominasi tertentu karena faktor nasab, kedudukan, dan sejenisnya. Muaranya, kata Al-Zamakhsyari, adalah ketakwaan, yang menjadi tolok ukur dan bukan gen ras tertentu. Lihat, Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari, *Al-Kasyshaf 'an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujub al-Ta'wil*, juz 5, (Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 1998), 585.

17. Al-Razi menafsirkan surah Al-Maidah [5]: 48 ini dengan mengatakan bahwa syariat sebelum Islam (*sya'u man qablana*) bukan kewajiban umat Islam, sebab setiap umat telah memiliki syariatnya masing-masing. Umat nabi Musa, nabi Isa, dan Nabi Muhammad, masuk dalam kitab ayat ini. Al-Razi juga menafsirkan *ummah wahidah*, dalam ayat ini, sebagai *jama'ah* umat di bawah satu konsensus syariat (*jama'ah muttafiqah 'ala syariah wahidah*). Lihat, Muhammad Fakhir al-Din al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir wa Fatah al-Ghayb*, juz 12, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 14.
18. Rusli, "Multikulturalisme dalam Wacana Al-Qur'an," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 9, No. 1, 2012, 107.
19. Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama* (Tangerang Selatan: IAA & PSQ, 2013), 3.
20. Hanafi, *Moderasi Islam...*, 6.
21. Ali Masykur Musa, *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam terhadap Isu-isu Aktual*, (Jakarta: PT Serambil Ilmu Semesta, 2014), 134.
22. Ayaan Hirsi Ali, *Heretic: Mengapa Islam Perlu Reformasi Sekarang*, terj. Muhammad Iqbal Suma, (Manado: Globalindo Publisher, 2020), 3.
23. Huzaemah T. Yanggo, "Strategi Wasathiyah Islam dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia," dalam Arief Subhan & Abdallah (Ed.), *Konstruksi Moderasi Beragama: Catatan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Ciputat: PPIM UIN Jakarta, 2021), 100.
24. Komaruddin Hidayat, "Moderasi Beragama: Menghargai, Menerima dan Merayakan Keragaman," dalam Subhan & Abdallah (Ed.), *Konstruksi Moderasi Beragama...*, 119.
25. Ulya Fikriyati, "Maqashid al-Qur'an dan Deradikalisasi Penafsiran dalam Konteks Keindonesiaan," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 1, 2014, 253.
26. Kementerian Agama RI, *Religious Moderation*, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat, 2021), 17.
27. Kementerian Agama RI, *Religious Moderation*, 18.
28. Ali A. Mazrui, *Islam: Between Globalization and Counterterrorism* (Trenton: Africa World Press, 2006), 96.
29. Benjamin R. Barber, *Jihad vs McWold; How Globalism and Tribalism are Reshaping the World* (New York: Ballantine Books, 1996), 206.
30. Barber, *Jihad vs McWold...*, 207.
31. Fikriyati, "Maqashid al-Qur'an...", 247. Antonim kata *al-'unf*, kekerasan, ialah *al-rifq* yang berarti kelembutan dan kasih sayang. Selain kata *al-'unf* tidak ada sama sekali dalam Al-Qur'an, istilah-istilah yang secara konotatif bermakna kekerasan pun disebutkan Al-Qur'an dalam konteks cita-cita nirkekerasan. Kata *al-qatl*, umpamanya, Al-Qur'an menyebutnya dalam konteks peringatan untuk manusia menjauhinya, seperti terdapat dalam surah Al-Nisa' [4]: 93 dan Al-Maidah [5]: 32 dan 33 yang sanksinya ialah hukuman mati bagi pembegal, pembunuh, penyalib, potong tangan bagi perampas harta, dan pengasingan jika tidak sampai membunuh. Selengkapnya, lihat, Hanafi, *Moderasi Islam...*, 34 dan 45-7.
32. Muhammad, *Menimbang Pluralisme...*, 9.
33. Mohammed Abu-Nimer, *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam: Teori dan Praktik*, terj. M. Irsyad Rhafsadi dan Khairil Azhar, (Jakarta: Pustaka Alvabet & Yayasan Wakaf Paramadina, 2010), 68.
34. Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid 3, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1968), 1543.
35. Nimer, *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam...*, 95.
36. Peter Herriot, *Religious Fundamentalism: Global, Local and Personal*, (New York: Routledge, 2009), 195.

37. Hanafi, *Moderasi Islam...*, 252.
38. Berbeda dengan ini, Sayyid Quthb mengatakan, surah AL-Kafirun turun untuk memberi perbedaan yang jelas antara Islam dengan paganisme Arab ketika itu. Sebab, Islam adalah lanjutan dari *millah* Ibrahim, klaim yang sama diutarakan para kaum Pagan. Surah Al-Kafirun, menurut Quthb, penegasian, penegasan, penguatan, bahwa Islam berbeda dengan agama Pagan. Kaum Pagan bukan orang beriman, dan umat Islam tidak menyembah apa yang kaum Pagan sembah. Ayat ini bagi Quthb merupakan komitmen tegas atas kebenaran Islam di satu sisi dan kebatilan paganisme di sisi lainnya. Lihat, Quthb, *Fi Zhalal al-Qur'an*, Jilid 6, 3991. Artinya, bagi Quthb, surah Al-Kafirun bukan ayat toleransi, melainkan penegasan sekat antara Islam dengan paganisme serta agama lainnya.
39. Osman, *Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan...*, 55 & 58.
40. Syamsul Arifin, *Populisme, Demokratisasi, Multikulturalisme: Artikulasi Baru Islam di Indonesia dalam Nalar Agama Publik*, (Malang: Intrans Publishing, 2019), 13.
41. Arifin, *Populisme, Demokratisasi, Multikulturalisme...*, 17.
42. Nimer, *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam...*, 68.
43. Nimer, *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam...*, 96-7.
44. Ekstremis di sini tidak secara khusus berkonotasi pada pelaku kekerasan seperti bom bunuh diri, melainkan kekerasan dalam apa pun bentuknya. Di Indonesia, mereka disebut juga sebagai kalangan konservatif dengan perilaku destruktifnya dalam konservatisme. Lihat, Norshahril Saat and Ahmad Najib Burhani (Ed.), *The New Santri: Challenges to Traditional Religious Authority in Indonesia* (Singapore: ISEAS & Yusof Ishak Institute, 2020), 17.
45. Osman, *Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan...*, 86.
46. Ulasan lengkap tentang HTI mudah dijumpai dalam banyak literatur. Misalnya buku yang ditulis oleh eks-ketua HTI yang sudah memahami seluk-beluk HTI, lihat Ayik Heriansyah, *Mengenal HTI Melalui Rasa Hati*, (Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2020).
47. Wikipedia, "Daftar aksi Front Pembela Islam," [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_aksi\\_Front\\_Pembela\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_aksi_Front_Pembela_Islam) (Diakses pada 19 Agustus 2022).

## Daftar Pustaka

- Ali, Ayaan Hirsi. *Heretic: Mengapa Islam Perlu Reformasi Sekarang*. Terj. Muhammad Iqbal Suma. Manado: Globalindo Publisher. 2020.
- Amin, Ahmad. *Fajr al-Islam*. Cet. ke-10. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi. 1969.
- Arifin, Syamsul. *Populisme, Demokratisasi, Multikulturalisme: Artikulasi Baru Islam di Indonesia dalam Nalar Agama Publik*. Malang: Intrans Publishing. 2019.
- Barber, Benjamin R. *Jihad vs McWold; How Globalism and Tribalism are Reshaping the World*. New York: Ballantine Books. 1996.
- Benet, Veronica. “Multiculturalism: Cultural, Social, and Personality Processes.” *The Oxford Handbook of Personality and Social Psychology*. 2012.
- Data Reportal. “Digital 2021: Indonesia,” <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia> (Diakses 19 Agustus 2022).
- Fikriyati, Ulya. “Maqashid al-Qur’an dan Deradikalisasi Penafsiran dalam Konteks Keindonesiaan.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 9, No. 1. 2014.
- Hanafi, Muchlis M. *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama*. Tangerang Selatan: IAA & PSQ. 2013.
- Hasyim, Syafiq. *Islam Nusantara dalam Konteks: Dari Multikulturalisme Hingga Radikalisme*. Yogyakarta: Penerbit Gading. 2018.
- Hegghammer, Thomas. *Jihadi Culture: The Art and Social Practices of Militant Islamists*. United Kingdom: Cambridge University Press. 2017.
- Heriansyah, Ayik. *Mengenal HTI Melalui Rasa Hati*. Jakarta: Pustaka Harakatuna. 2020.
- Herriot, Peter. *Religious Fundamentalism: Global, Local and Personal*. New York: Routledge. 2009.
- Kementerian Agama RI. *Religious Moderation*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 2021.
- Kolig, Erich. *Conservative Islam: A Cultural Anthropology*. Maryland: Lexington Books. 2012.
- Mazrui, Ali A. *Islam: Between Globalization and Counterterrorism*. Trenton: Africa World Press. 2006.
- Muhammad, Husein. *Menimbang Pluralisme: Belajar dari Filsuf dan Kaum Sufi*. Bandung: PT Mizan dan Nuralwala. 2021.
- Musa, Ali Masykur. *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam terhadap Isu-isu Aktual*. Jakarta: PT Serambil Ilmu Semesta. 2014.
- Nimer, Mohammed Abu-. *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam: Teori dan Praktik*. Terj. M. Irsyad Rhafsadi dan Khairil Azhar. Jakarta: Pustaka Alvabet & Yayasan Wakaf Paramadina. 2010.

- Osman, Mohamed Fathi. *Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan: Pandangan Al-Qur'an, Kemanusiaan, Sejarah, dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 2006.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilal al-Qur'an*. Jilid 3. Kairo: Dar al-Syuruq. 1968.
- Razi, Muhammad Fakhr al-Din al-. *Al-Tafsir al-Kabir wa Fatahih al-Ghayb*. Juz 12. Beirut: Dar al-Fikr. 1981.
- Rusli. "Multikulturalisme dalam Wacana Al-Qur'an." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 9, No. 1. 2012.
- Saat, Norshahril, Ahmad Najib Burhani (Ed.). *The New Santri: Challenges to Traditional Religious Authority in Indonesia*. Singapore: ISEAS & Yusof Ishak Institute. 2020.
- Subhan, Arief & Abdallah (Ed.). *Konstruksi Moderasi Beragama: Catatan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Ciputat: PPIM UIN Jakarta. 2021.
- Wasino. "Indonesia: From Pluralism to Multiculturalism." *Paramita*. Vo. 23, No. 2. 2013.
- Zamakhshari, Mahmud bin Umar al-. *Al-Kasysyaf'an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*. Riyadh: Maktabah al-'Abikan. 1998.